

PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM
KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DENGAN BERPEDOMAN
PADA PSAP 02 (PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH) DI DESA
UMBU'ASI BARAT

By Mefina Waruwu

**PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN
BERPEDOMAN PADA PSAP 02 (PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH) DI DESA
UMBU'ASI BARAT**

TUGAS AKHIR



Oleh :

**Mefina Waruwu
2121009**

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

**PENGOPERASIAN ² APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI
ANGGARAN ² DENGAN BERPEDOMAN PADA PSAP 02
(PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH) DI
DESA UMBU'ASI BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada :

Universitas Nias

⁵⁴ Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Ahli Madya Pada Program Studi D-III Akuntansi

⁸²
Oleh :

**Mefina Waruwu
2121009**

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

ABSTRAK

PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PSAP 02 DI DESA UMBU'ASI BARAT

Oleh

Mefina Waruwu

Pembuatan laporan keuangan desa menggunakan sistem manual sering terjadi kesalahan, seperti ketidaksesuaian hasil perincian dana desa. Selain itu, penggunaan sistem manual membutuhkan banyak kertas dan menghabiskan anggaran desa yang cukup besar di Desa Umbu'asi Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) membuat peraturan agar seluruh desa menerapkan aplikasi sistem keuangan desa untuk pembuatan laporan keuangan. Hal ini mendorong Desa Umbu'asi Barat untuk menerapkan aplikasi sistem keuangan desa dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa, dari segi kualitas, ketepatan waktu, tujuan, standar, umpan balik, alat/sarana, kompetensi, motif, dan peluang, sudah cukup baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur desa. Pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa juga membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Pengoperasian Aplikasi Siskeudes, Laporan Realisasi Anggaran, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

ABSTRACT

77 OPERATION OF THE VILLAGE FINANCIAL SISTEM APPLICATION (SISKEUDES) IN PREPARING BUDGET REALIZATION REPORTS GUIDED BY PSAP 02 IN WETS UMBU'ASI BARAT VILLAGE

By

MEFINA WARUWU

6
The preparation of village financial reports using a manual system often results in errors, such as discrepancies in the detailed accounting of village funds. Furthermore, the use of a manual system requires a lot of paper and consumes a significant portion of the village budget in Umbu'asi Barat Village. Therefore, the Central Government and BPKP (The Financial and Development Supervisory Agency) have made regulations requiring all villages to implement a village financial system application for the preparation of village financial reports. This has prompted Umbu'asi Barat Village to implement a village financial system application in an effort to improve the performance of the village officials. This study uses a descriptive method with qualitative analysis, with primary and secondary data sources obtained through interviews, observations, and documentation. The research results show that the operation of the village financial system application, in terms of quality, timeliness, goals, standards, feedback, tools/facilities, competence, motivation, and opportunities, has been quite good, thus able to improve the performance of the village officials. The operation of the village financial system application has also made the management of village finances more transparent and accountable.

Keywords : Operation Of The Siskeudes Application, Budget Realization Report, Statement Of Government Accounting Standars.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih atas rahmat dan anugerah-nya yang berkelimpahan memberikan pengetahuan, kekuatan, kemampuan sepanjang kehidupan penulis, Tugas Akhir yang Berjudul “Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Berpedoman Pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) Di Desa Umbu’asi Barat” ini dapat diselesaikan semata-mata karena belas kasihan Allah yang maha penyayang kepada penulis. Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa penyusun Tugas akhir ini, bukanlah semata mata karena kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerjasama, motivasi, dukungan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulis.

1. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si, Selaku Rektor Universitas Nias.
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kurniawan S. Zai, SE.,M.Ak.,Ak, Selaku Dosen Pembimbing
3. Ucapan terima kasih kepada Ibu Serniati Zebua, S.Pt.,M.Si, Selaku Ketua Program Studi D III Akuntansi

4. Seluruh bapak/ibu Dosen di Universitas Nias¹⁵ atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis

³⁷ Semoga allah yang maha penyayang dan pengasih melimpahkan anugerah dan rahmatnya dengan berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut mendukung penyelesaian tugas akhir ini, kiranya tuhan memberkati kita.

Gunungsitoli, Agustus 2024

Penulis,

MEFINA WARUWU
NPM : 2121009

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian	4
1.5.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	5
1.5.3 Jenis dan Sumber Data	5
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	9
2.1.1 Pengertian Aplikasi (Siskeudes)	9
2.1.2 Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.....	10
2.1.3 Hambatan atau Kendala Dalam Pengoperasian Apk Siskeudes	11
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa	11
2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran	12
2.1.6 Format Laporan Realisasi Anggaran.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu	22

25	2.3 Kerangka Berpikir	25
BAB III PEMBAHASAN		26
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian		26
31	3.1.1 Sejarah Singkat Desa Umbu'asi Barat	26
51	3.1.2 Visi dan Misi	27
51	3.1.3 Program Kerja	27
51	3.1.3 Struktur Organisasi	29
51	3.2 Pembahasan	30
19	3.2.1 Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	30
	3.2.3 Administrasi Data User	34
	3.2.4 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Desa Umbu'asi Barat..	35
33	3.2.5 Kesimpulan Laporan Realisasi Anggaran	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		42
	4.1 Kesimpulan	42
	4.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		45
DAFTAR LAMPIRAN		46

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa mencakup desa, desa adat, atau sebutan lain yang serupa. Desa adalah entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas utama pemerintah desa meliputi pengaturan dan pengelolaan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa, diperlukan pendapatan yang memadai.

Dengan adanya dana bantuan untuk desa, pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi berkualitas. Laporan keuangan yang baik harus memenuhi kriteria relevansi, keandalan, perbandingan, dan pemahaman sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk mencegah potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan langkah-langkah antisipasi, pengendalian, dan pencegahan melalui struktur dan sistem yang efektif. Hal ini memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Dalam hal ini, semua instansi terkait termasuk Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten—harus bersinergi dalam pengendalian dan pengawasan dana desa.

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah mengubah cara pemerintah daerah dalam mengelola sistem keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Menurut Rostami dan Mongadam (2010), teknologi informasi dapat berfungsi sebagai pendukung yang sangat efektif bagi organisasi dalam menerapkan strategi yang telah ditetapkan.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal untuk mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini sejalan dengan perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aplikasi tersebut resmi diluncurkan pada 13 Juli 2015.

Mulai tahun 2015 secara bertahap Aplikasi Sistem Keuangan Desa mulai diperkenalkan kesetiap Desa-desa termasuk desa diwilayah Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan hasil pengamatan, implementasi sistem keuangan desa tidak semua dapat mengimplementasikannya dengan baik. Hal tersebut terjadi karena (1) Terbatasnya pendukung sumber daya manusia pada publikasi keuangan (2) Kurang efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi dan informasi komputer (3) Tidak semua operator sistem keuangan desa memiliki latar belakang akuntansi. Upaya pematapan aplikasi Sistem Keuangan

Desa tersebut terus dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan observasi di Desa Umbu'asi Barat, aplikasi Siskeudes dapat meminimalisir kecurangan dan menawarkan kemudahan operasional, serta menghasilkan laporan yang lebih lengkap. Dampaknya bagi aparat desa dan Bendahara desa sangat positif; proses input data menjadi lebih mudah, dan laporan akhir yang dihasilkan sangat membantu serta lebih akurat dalam pelaksanaan tugas.

Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan yang lebih mandiri dan mencapai tujuan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, serta memaksimalkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat pentingnya penggunaan aplikasi sistem keuangan desa untuk menciptakan pengelolaan yang akuntabel, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) di Desa Umbu'asi Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah **“Bagaimana Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) di Desa Umbu'asi Barat”**?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Penyusunan Laporan

Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) di Desa Umbu'asi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan menjadi sumber acuan bagi peneliti selanjutnya, terutama yang akan meneliti variabel-variabel terkait. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam mencapai akuntabilitas keuangan desa, serta menambah pengalaman dan memenuhi salah satu syarat kelulusan D-III Akuntansi.

3. Bagi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Desa Umbu'asi Barat, berupa masukan dan pertimbangan terkait hasil penelitian mengenai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan di desa tersebut.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Creswell dalam Herdinsyah (2014:8) memaknai penelitian deskriptif kualitatif sebagai proses penelitian ilmiah yang sarannya ialah untuk mendapatkan pemahaman perihal sejumlah masalah manusia dalam konteks sosial melalui penyajian gambaran secara keseluruhan, termasuk memberikan pelaporan terkait perspektif detail dari sejumlah sumber informasi.

Sementara Sugiyono (2019:18) mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode yang diterapkan dalam menjalankan penelitian dengan berpilar atau berdasar pada filsafat postpositivisme, diaplikasikan untuk meneliti pada kondisi objek yang sifatnya alamiah (lawannya ialah eksperimen). Pada penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan oleh peneliti agar dapat memperoleh dan informasi lapangan secara langsung dan peneliti melakukan pengamatan mengenai efektivitas Pengoperasian Aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat.

1.5.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Desa Umbu'asi Barat, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian mulai dari tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456), data primer adalah data yang secara langsung menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pencari data. Peneliti mengumpulkan data ini secara mandiri dan langsung dari subjek utama (*key informan*) atau dari lokasi penelitian, serta data tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu di Desa Umbu'asi Barat.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456), data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak ketiga atau dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, dan artikel

yang relevan dengan topik mengenai sistem dan prosedur penggajian untuk mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109), observasi adalah proses pengamatan langsung oleh peneliti untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang holistik dan menyeluruh.

b. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Yusuf (2014:372), wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dan narasumber, di mana narasumber memberikan informasi melalui sesi tanya jawab langsung mengenai objek yang sedang diteliti. Metode wawancara ini bertujuan untuk memahami pendapat informan dan memperoleh pemahaman mendalam mengenai topik penelitian yang sedang dilakukan.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2018:476) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah langkah yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi berupa arsip, buku, dokumen, dan sumber lainnya yang dapat berupa angka atau gambar dalam bentuk laporan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai penunjang penelitian dengan menyediakan bahan-bahan yang relevan dan mendukung.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Selama wawancara, peneliti menganalisis jawaban narasumber, dan jika hasilnya belum memuaskan, peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan hingga

memperoleh data yang dianggap kredibel. ²⁷ Aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ⁷² dapat memakan waktu sehari-hari atau bahkan berbulan-bulan, menghasilkan sejumlah besar data. Pada awalnya, peneliti menjelajahi situasi sosial atau objek penelitian secara umum, sehingga data yang diperoleh menjadi ⁴³ sangat banyak dan bervariasi.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya banyak, sehingga ³⁸ perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Seiring berjalannya waktu, jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk mengatasi hal ini, analisis data harus segera dilakukan melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilah, dan ⁴⁶ memilih elemen-elemen penting, serta mencari tema dan pola. Dengan mereduksi data, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mempermudah ³⁰ pengumpulan data selanjutnya, dan memudahkan pencarian data saat diperlukan.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan kategori, flowchart, dan sejenisnya. Metode ¹⁸ yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai apa yang terjadi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

4. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan awal bersifat tentatif ¹⁸ dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang sah dan konsisten saat data dikumpulkan kembali, maka kesimpulan tersebut dianggap dapat dipercaya.

1 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

2.1.1 Pengertian Aplikasi (Siskeudes)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aplikasi adalah rancangan sistem untuk mengelola data menggunakan aturan dan bahasa program, yang dibuat untuk memudahkan pelaksanaan tugas khusus pengguna. Aplikasi berfungsi sebagai alat untuk pengelolaan data. Menurut Sanjaya (2015), aplikasi adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lainnya.

22
52 Sistem Keuangan Desa, atau Aplikasi Siskeudes, adalah alat yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mempermudah pelaporan keuangan desa dan memastikan pengelolaan keuangan desa secara optimal. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta diyakini mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. 12 83

Menurut Jogiyanto (2013), Aplikasi Siskeudes adalah penerapan dan penyimpanan data, permasalahan, atau pekerjaan ke dalam suatu sarana atau media. Aplikasi ini digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal-hal tersebut sehingga berubah menjadi bentuk baru, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari data, permasalahan, dan pekerjaan tersebut. 17

Aplikasi Sistem Keuangan Desa sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa dengan kemudahan operasionalnya. Pengguna hanya perlu memasukkan data atau transaksi, dan laporan yang diinginkan, seperti buku kas umum atau buku kas pembantu pajak, akan langsung tersedia. Tujuan utama sistem ini adalah untuk mengatasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

2.1.2 Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Menurut surat edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 412.2/594/BPDI tanggal 28 Agustus 2019, tujuan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebagai alat bantu berbasis sistem informasi yang resmi dari pemerintah. Siskeudes dirancang untuk memudahkan pemerintah desa dalam penatausahaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Aplikasi ini mengakomodasi seluruh regulasi terkait keuangan desa, dirancang secara terintegrasi dan user-friendly sebagai desktop application, serta memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa berfungsi untuk mengakomodasi seluruh proses pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Manfaat dari pelaporan keuangan desa meliputi penilaian efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan sumber daya ekonomi desa dalam satu tahun anggaran, serta mengetahui nilai kekayaan bersih desa hingga posisi terakhir periode pelaporan. Ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa.

2.1.3 Hambatan atau Kendala Dalam Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Siskeudes mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa, memberikan kemudahan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara sistematis, efektif, dan efisien. Aplikasi ini telah digunakan dengan efektif di Desa Umbu'asi Barat untuk pengelolaan keuangan secara online, meskipun sistem offline juga masih digunakan. Pemerintah Desa Umbu'asi Barat telah menerapkan aplikasi ini dengan baik, merasa terbantu dalam pengelolaan keuangan, dan operator desa telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola setiap tahapan penginputan data.

Beberapa kendala dalam proses penginputan data ke aplikasi Siskeudes termasuk sistem yang sering error, mengganggu proses input data. Untuk meminimalisir gangguan ini, sebaiknya menghubungi pihak pendamping desa yang telah memberikan pelatihan. Selain itu, tahapan penatausahaan juga cukup sulit karena memerlukan ketelitian dalam mencocokkan data dengan buku atau rekening bank. Kesalahan pada tahap ini dapat memengaruhi proses selanjutnya, sehingga dibutuhkan waktu lebih dan sumber daya manusia yang kompeten. Operator desa yang mengelola aplikasi Siskeudes harus memiliki pengalaman, kompetensi, dan keahlian yang memadai untuk mengurangi kesalahan dalam penginputan.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Aplikasi Siskeudes dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan dan penganggaran, meliputi RPJMdes yang mencakup visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan, serta rencana kegiatan. RKPDes adalah penjabaran RPJMdes untuk satu tahun, dan APBdes adalah

rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh pemerintah desa dan BPD. Pengelolaan keuangan desa harus sederhana namun tetap transparan dan akuntabel. Penting juga untuk mengidentifikasi risiko kesalahan administratif dan substantif yang bisa menyebabkan masalah hukum, terutama jika kompetensi kepala desa dan perangkat desa belum memadai. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada pengelolaan keuangan desa yang baik.

67

2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun untuk menyoroiti elemen-elemen penting seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan agar penyajiannya wajar. Laporan ini membandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penjelasan lebih rinci mengenai laporan ini terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, seperti kebijakan fiskal dan moneter, alasan perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-detail yang memberikan klarifikasi tambahan pada angka-angka yang dianggap perlu.

10

2.1.6 Format Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8	Pendapatan Bea Masuk				
9	Pendapatan Pajak Ekspor				
10	Pendapatan Pajak Lainnya				
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)				
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	xxx	xxx	xx	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
23					
24	BELANJA				
25	BELANJA OPERASI				
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
28	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
29	Subsidi	xxxx	xxxx	xx	xxxx
30	Hibah				
31	Bantuan Sosial				
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	xxx	xxx	xx	xxx
34		xxx	xxx	xx	xxx
35	BELANJA MODAL				
36	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Gedung dan Bangunan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				

40	Belanja Aset Tetap Lainnya				
41	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	XXX	XXX	XX	XXX
43	JUMLAH BELANJA (33 + 42)	XXX	XXX	XX	XXX
44		XXX	XXX	XX	XXX
45	TRANSFER	XXX	XXX	XX	XXX
46	DANA PERIMBANGAN	XXX	XXX	XX	XXX
47	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
49	Dana Alokasi Umum				
50	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	XXX	XXXX	XX	XXXX
52					
53	TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)				
54	Dana Otonomi Khusus				
55	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	XXX	XXX	XX	XXX
57	JUMLAH TRANSFER (51 + 56)	XXX	XXXX	XX	XXXX
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)	XXX	XXXX	XX	XXXX
59					
60	SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)	XXX	XXX	XXX	XXX
61	PEMBIAYAAN				
62	PENERIMAAN				
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
64	Penggunaan SAL	XXX	XXX	XX	XXX
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX	XX	XXX
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
68	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XX	XXX
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
70	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	XXX	XXX	XX	XXX
72		XXX	XXX	XX	XXX
73	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI	XXX	XXX	XX	XXX
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX	XX	XXX
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
77	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)				
78					
79	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XX	XXX
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	XXX	XXX	XX	XXX

81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	xxx	xxx	xx	xxx
88		xxx	xxx	xx	xxx
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xxx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	xxx	xxx	xxx	xxx
93	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)	xxx	xxx	xxx	xxx
94	PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)	xxx	xxx	xxx	xxx
95					
96	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94)	xxx	xxx	xxx	xxx

**PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH:				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)	xxx	xxx	xx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
38					

39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
47					
48	BELANJA TAK TERDUGA				
49	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)	xxx	xxxx	xx	xxxx
51	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)	xxx	xxxx	xx	xxxx
52					
53	TRANSFER				
54	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
58	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)	xxx	xxxx	xx	xxxx
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)	xxx	xxxx	xx	xxxx
60					
61	SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)	xxx	xxx	xx	xxx
				x	
62					
63	PEMBIAYAAN				
64					
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
66	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
78	Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
79					

80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
81	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx

39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA:				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)				
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
68					
69	PEMBIAYAAN				
70					
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx

84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
85					
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	PEMBIAYAAN NETO (84 - 92)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

26

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan hasil-hasil sebelumnya dan menemukan inspirasi untuk studi berikutnya, sekaligus membantu peneliti mempromosikan serta menunjukkan orisinalitas penelitian mereka. Di bagian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terkait dengan topik yang akan diteliti, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, serta menyajikan ringkasannya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang sedang dikaji.

7

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung (2018)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Umbu'asi Barat telah berlangsung dengan baik, (2) Prosedur pemanfaatan SISKEUDES mengikuti empat tahapan: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengadministrasian, dan Pelaporan, dan (3) Sistem Keuangan Desa memberikan dampak positif pada kinerja setiap karyawan.
Eleuterius Tri Kurnia	Analisis Persepsi	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi

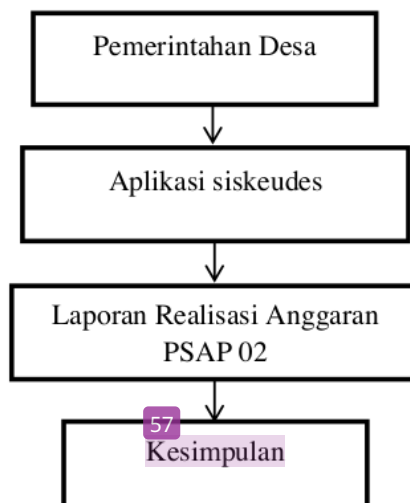
(2019)	15 Aparatur Desa Terhadap Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)		15 kegunaan dan minat perilaku dalam menggunakan teknologi tidak memiliki dampak nyata pada penggunaan teknologi itu sendiri. Sementara itu, 15 pengalaman terbukti tidak mempengaruhi persepsi kegunaan, tetapi mempengaruhi persepsi kemudahan. Selain itu, 15 persepsi kemudahan terbukti mempengaruhi persepsi kegunaan serta sikap terhadap penggunaan teknologi.
Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni, Putu Sukma Kurniawan (2017)	21 Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa	Kualitatif	7 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penginputan data dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus sesuai dengan informasi yang tercatat dalam sistem.
Gayatri, Made Y L (2018)	42 Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Des	Deskriptif Kualitatif	17 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mewajibkan desa untuk menerapkan SISKEUDES dalam mengelola dana desa (DD). kesimpulannya, penerapan SISKEUDES di Desa Umbu'asi

			Barat menunjukkan keefektifan dalam laporan keuangan DD.
--	--	--	--

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017:60), kerangka berpikir adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang dianggap sebagai masalah penting. Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai panduan dalam penelitian, dan isinya adalah jawaban dari rumusan masalah berdasarkan kajian teori. Oleh karena itu, setelah teori yang telah dijelaskan, kerangka berpikir dapat disusun sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Singkat Desa Umbu'asi Barat

Desa Umbu'asi Barat didirikan tahun 2009 yang merupakan hasil gabungan kampung pada saat itu dikampung hilila'edo. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dari tahun ke tahun, Umbu'asi Barat mengalami perkembangan dibidang kependudukan dan perkembangan perekonomian dibidang pertanian.

Pada perkembangan dalam enam periode terakhir Jabatan Kepala Desa Desa Umbu'asi Barat dapat dilihat ⁶⁵ pada tabel berikut ini:

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Tahun 2009-2012	ELIZAMA WARUWU	
2	Tahun 2012-2013	SUDIRMAN WARUWU	
3	Tahun 2013-2015	ELIZAMA WARUWU	
4	Tahun 2015-2016	ROZAMA NDRURU	
5	Tahun 2017-2020	ELIZAMA WARUWU	
6	Tahun 2020 – Sekarang	WELIS NDRURU	

3.1.2 Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya masyarakat yang mandiri, nyaman, tertip, serta sejahtera dan peduli.

Misi :

1. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, dan partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan desa yang lebih aman dan damai.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan, peningkatan produksi, produktivitas, dan penyediaan infrastruktur.
5. Meningkatkan kualitas SDM, memanfaatkan potensi SDA, melibatkan perempuan, serta melakukan pembinaan keagamaan di masyarakat desa.
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan meningkatkan dan menyediakan sarana dan prasarana desa.

3.1.3 Program Kerja

1. Bidang Pemerintahan

1. Meningkatkan pelayanan publik di kantor desa dengan menerapkan sistem layanan cepat dan tepat melalui metode 4 S (Senyum, Salam, Sapa, dan Santun).

2. Perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif dan terbuka, dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab.
3. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

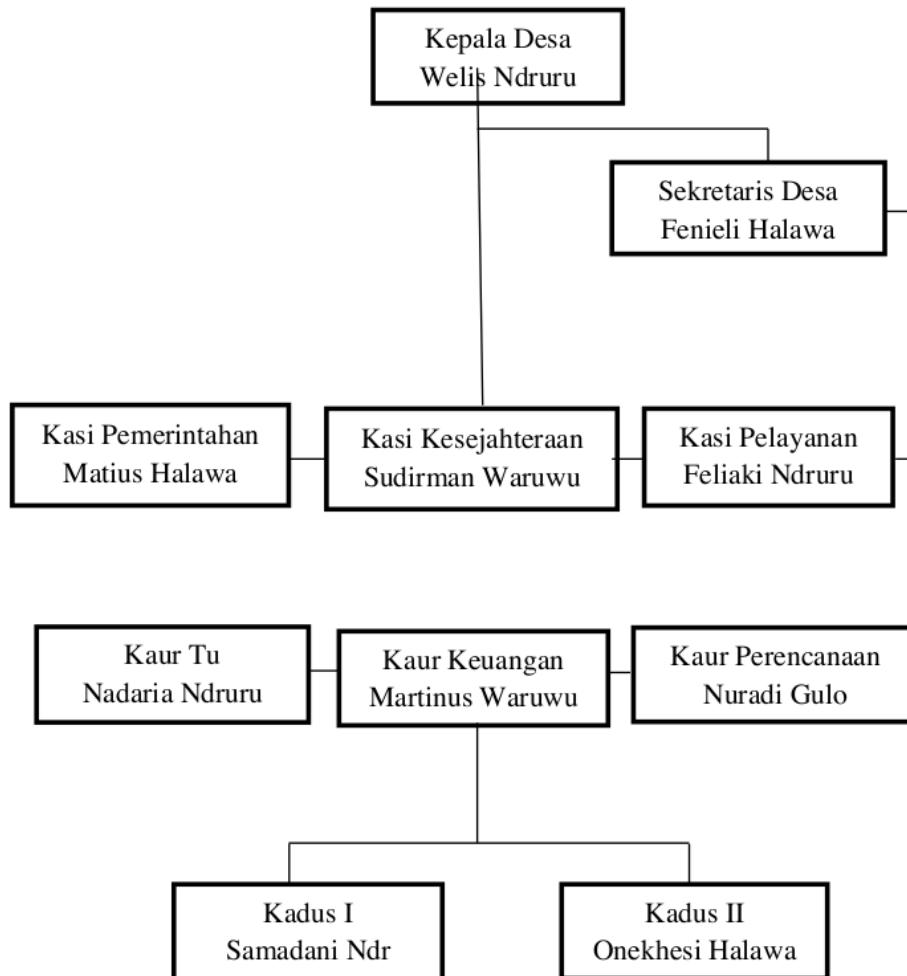
2. Bidang Pembangunan dan pelestarian hasil pembangunan

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran di desa.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan PLN untuk penyediaan jaringan listrik yang masih kurang.
4. Mengidentifikasi sarana dan prasarana desa yang mengalami kerusakan sebagai aset desa.

3. Bidang Kesehatan

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk puskesmas pembantu dan posyandu.
2. Membangun polindes di dusun-dusun yang jauh dari puskesmas pembantu.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menyediakan ambulans desa atau mobil siaga untuk keadaan darurat, seperti penyakit parah, kecelakaan, persalinan, dan risiko tinggi lainnya.
4. Memberikan insentif atau biaya operasional bagi kader posyandu dan kader Bina Keluarga Balita (BKB) melalui Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.2 Pembahasan

3.2.1 Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Prosedur penggunaan aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dimulai dengan permohonan dari pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri atau perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar aplikasi Siskeudes dapat dikoordinasikan dan diterapkan secara seragam di seluruh desa dalam wilayah pemerintah daerah tersebut. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskeudes diberikan melalui kode resmi yang dikeluarkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah-langkah penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dimulai dari:

a. Login

Untuk mengakses aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pengguna harus mengisi menu login user dengan benar. Tujuan dari login user adalah untuk melindungi data dalam aplikasi Siskeudes dan memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki otoritas yang dapat mengaksesnya. Login user juga menunjukkan level otoritas dalam penggunaan aplikasi, yaitu: level operator (untuk pemerintah desa), level supervisor (untuk pemerintah kecamatan), dan level admin (untuk pemerintah daerah/DPMD).

Gambar 1. Tampilan Login Aplikasi Siskeudes



The image shows a login window titled "Login User" with a subtitle "AUTHENTIKASI USER". It contains three input fields: "User ID" with the value "user", "Password" with masked characters "****", and "Tahun Anggaran" with the value "2019". There is a checked checkbox labeled "Default" next to the year field. At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Batal".

1

Setelah mengisi user ID, kata sandi, dan tahun anggaran, klik "OK." Untuk pemerintahan desa, login aplikasi Siskeudes diisi dengan user ID: "user" dan password: "user" Selanjutnya, login user akan diatur oleh admin Siskeudes pemerintah daerah/DPMD, sehingga setiap desa akan menerima user ID dan password yang berbeda..

3

Untuk melindungi kerahasiaan user ID dan password, aplikasi Siskeudes menyediakan menu untuk mengganti user ID dan password. Caranya adalah dengan menginput user ID dan password lama, kemudian memasukkan user ID dan password baru. Konfirmasi diisi dengan password baru untuk memastikan kesesuaian password yang baru..

Gambar 2. Tampilan Menu Ganti User ID dan Password Siskeudes

The screenshot shows a web application window titled "Ganti UserID". The main heading is "GANTI ID USER DAN PASSWORD". The form is divided into two sections. The top section has "User ID" with the value "admin" and an empty "Password" field. The bottom section has "UserID Baru", "Password", and "Konfirmasi" fields, all of which are empty. At the bottom right, there are two buttons: "Ganti" and "Batal".

3

Disarankan kepada pemerintahan desa untuk mengganti password secara berkala guna menjaga keamanan user ID dan password yang digunakan. Setelah login, akan muncul beberapa alat di pojok kiri atas layar. Selanjutnya, lakukan double klik pada tulisan "Data Entri".

3
Gambar 3. Tampilan Awal Siskeudes setelah login



3
Secara umum, menu “Data Entri” digunakan oleh pemerintah desa dan dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Tahapan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapainya, merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh, dan akhirnya mencapai tujuan tersebut (Bastian, 2015). Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat melalui musyawarah desa untuk menampung aspirasi dan merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa harus memerhatikan skala prioritas pembangunan desa untuk memastikan pembangunan merata.

b. Tahapan Penganggaran

Proses penganggaran akan dilakukan apabila RKP desa sudah ditetapkan. Pada tahap ini akan dilakukan proses penyusunan APB Desa yang disesuaikan dengan RKP desa. APB Desa merupakan suatu anggaran yang mencakup rencana keuangan tahunan pemerintah desa dimana mencakup program atau kegiatan yang akan dilaksanakan

sesuai dengan kewenangan desa. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya (BPKP, 2016).

c. Tahapan Penatausahaan

Proses penganggaran dilakukan setelah RKP desa ditetapkan. Pada tahap ini, disusun APB Desa yang sesuai dengan RKP desa. APB Desa adalah anggaran tahunan pemerintah desa yang mencakup program atau kegiatan sesuai kewenangan desa. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan yang cukup dan dasar hukum yang jelas (BPKP, 2016).

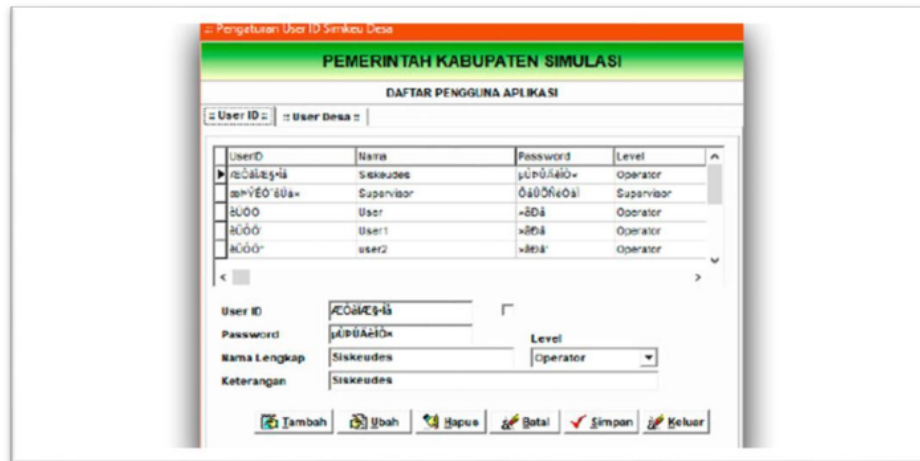
d. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan, akan dihasilkan laporan keuangan yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja atau anggaran yang telah direalisasikan, seperti dalam hal pembangunan. Laporan pertanggungjawaban ini hanya akan muncul jika semua tahapan sebelumnya dilalui dengan benar. Jika terdapat kesalahan pada salah satu tahap, laporan pertanggungjawaban tidak akan muncul di sistem. Oleh karena itu, ketelitian dan fokus sangat penting saat menginput dan mengolah data dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan akan digunakan untuk melaporkan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Setelah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dihasilkan, Kepala Desa wajib melaporkannya secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

20

3.2.3 Administrasi Data User

Menu Administrasi Data User digunakan untuk menentukan user ID, password, dan level pengguna aplikasi Siskeudes seperti dijelaskan pada menu Login. Menu Parameter Data hanya dapat diakses oleh user ID dengan level administrator di tingkat Kabupaten/Kota. Menu lainnya diakses oleh operator di tingkat kecamatan (level supervisor) dan desa (level operator).



Dalam menu ini, juga ditetapkan batasan kewenangan pengguna aplikasi untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia. Administrator menetapkan batasan menu yang dapat diakses oleh user dengan level supervisor/operator pada Aplikasi Siskeudes..

3.2.4 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Desa Umbu'asi Barat

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA UMBUASI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.059.729.895,00	1.059.729.895,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	922.522.000,00	922.522.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	922.522.000,00	922.522.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	137.207.895,00	137.207.895,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	137.207.895,00	137.207.895,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.059.729.895,00	1.059.729.895,00	0,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	442.471.490,00	442.463.595,00	7.895,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	354.971.490,00	354.963.595,00	7.895,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	82.096.490,00	82.088.595,00	7.895,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.096.490,00	82.088.595,00	7.895,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.096.490,00	20.088.595,00	7.895,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.096.490,00	5.088.595,00	7.895,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	441.747.000,00	441.740.800,00	6.200,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	421.747.000,00	421.740.800,00	6.200,00
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	150.938.500,00	150.938.500,00	0,00
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	150.938.500,00	150.938.500,00	0,00
2.3.5	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	150.938.500,00	150.938.500,00	0,00
2.3.5	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	39.387.500,00	39.387.500,00	0,00
2.3.5	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	111.551.000,00	111.551.000,00	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	270.808.500,00	270.802.300,00	6.200,00
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.766.200,00	20.760.000,00	6.200,00
2.3.12	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.166.200,00	8.160.000,00	6.200,00
2.3.12	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.12	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.3.12	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.3.12	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.166.200,00	1.160.000,00	6.200,00
2.3.12	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.3.12	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.3.12	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.3.12	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	250.042.300,00	250.042.300,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	250.042.300,00	250.042.300,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	40.182.000,00	40.182.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	202.330.600,00	202.330.600,00	0,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	7.529.700,00	7.529.700,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	87.000.000,00	84.000.000,00	3.000.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.4		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
<u>3.3</u>		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>38.000.000,00</u>	<u>35.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	18.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
<u>3.4</u>		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>14.000.000,00</u>	<u>14.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.3</u>		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>93.600.000,00</u>	<u>93.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.4		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>38.000.000,00</u>	<u>35.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	18.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>14.000.000,00</u>	<u>14.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>93.600.000,00</u>	<u>93.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>93.600.000,00</u>	<u>93.600.000,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.074.818.490,00	1.071.804.395,00	3.014.095,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(15.088.595,00)	(12.074.500,00)	(3.014.095,00)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.088.595,00	15.088.595,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.088.595,00	15.088.595,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.088.595,00	15.088.595,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			15.088.595,00	15.088.595,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAH			0,00	3.014.095,00	(3.014.095,00)

UMBUASI BARAT, 08 August 2024

Kepala Desa Umuasi Barat
Kecamatan Hilisawa'ahe



WELIS NGRURU, S Pd

66

3.2.5 Kesimpulan Laporan Realisasi Anggaran

Dari penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Desa Umbu'asi Barat, desa tersebut sudah dapat menyusun laporan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 02. Aplikasi Siskeudes mendukung pemerintah desa dalam proses penyusunan laporan keuangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Uumbu'asi Barat dapat dikatakan cukup efektif dan berjalan baik karena mengikuti prosedur pengelolaan keuangan desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan/pertanggungjawaban.
- b. Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) atau operator pengguna aplikasi Siskeudes di Desa Uumbu'asi Barat dapat dikatakan sudah cukup siap. Meskipun operator memiliki latar belakang pendidikan SMA, SDM yang ada telah mampu memenuhi kebutuhan operasional aplikasi dengan baik.
- c. Manfaat dari penggunaan aplikasi ini adalah Pemerintah Desa Uumbu'asi Barat merasa terbantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi. Hal ini mempermudah pelaporan tepat waktu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, serta mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.
- d. Kendala dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa meliputi adanya error sistem saat penginputan, yang menghambat proses tersebut. Selain itu, tahapan penatausahaan memerlukan waktu yang cukup lama dan ketelitian ekstra untuk menghindari kesalahan dalam penginputan data.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintahan Desa

- a. Pemerintah Desa Umbu'asi Barat diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes dan memberikan pelatihan tambahan bagi pegawai yang belum mengikuti pelatihan. Hal ini penting agar semua pegawai memahami dan dapat mengoperasikan aplikasi tersebut, meskipun hanya satu pegawai yang ditunjuk sebagai operator utama.
- b. Pemerintah Desa Umbu'asi Barat diharapkan dapat mempertahankan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat mendukung proses pengelolaan keuangan desa secara optimal dalam pelaksanaannya.
- c. Pemerintah Desa Umbu'asi Barat disarankan untuk lebih sering berkomunikasi dengan pemerintah setempat atau pendamping desa jika terjadi *error* pada aplikasi. Hal ini akan membantu meminimalkan kendala dan mempercepat penyelesaian masalah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian terkait Pengoperasian Aplikasi Siskeudes bisa menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner.

3. Ucapan Terimakasih

Dalam penyusunan paper ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan paper ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pegawai Kantor Desa Umbu'asi Barat, Kecamatan Hilisalawa'ahe, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain itu, penulis

mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Jogiyanto, H. M. 1999. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. "Aplikasi.
- Permendagri 73.(2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.Permendagri 73 Tahun 2020.
- BPKP.(2018). *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis)*.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara yang diperoleh peneliti di Desa Umbu'asi Barat terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul Pengoperasian Aplikasi Siskeudes dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 di Desa Umbu'asi Barat.

Nara Sumber :

1. Kaur Keuangan
2. Operator Siskeudes

Daftar Pertanyaan :

I. Kesiapan Pemerintahan Desa Dalam Mengoperasikan Aplikasi Siskeudes

1. Bagaimana kesiapan pemerintahan desa Umbu'asi Barat dalam menerapkan aplikasi Siskeudes ?
2. Bagaimana cara Pemerintahan Desa dalam Megintergrasikan aplikasi Siskeudes kepada SDM nya?
3. Siapa yang mengoperasikan Aplikasi Siskeudes dan perbedaanya bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan apikasi Siskeudes ?
4. Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah menerapkan aplikasi Siskeudes ?

II Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat

1. Sejak kapan desa Umbu'asi Barat mulai menerapkan aplikasi Siskeudes ?
2. Apakah di Desa Umbu'asi Barat sudah menerapkan yang namanya PSAP 02 dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes ?

3. Apakah implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat memengaruhi kinerja pemerintahan desa dalam menyusun laporan keuangan desa ?
4. Apa dampak yang dirasakan dengan adanya aplikasi Siskeudes ?

Transkrip Rekaman Wawancara

Nama Informan 1 : Martinus Waruwu
Jabatan : Kaur Keuangan
Nama Informan 2 : Primer Abdi Putra Waruwu, S.p
Jabatan : Operator Siskeudes
Tanggal/Jam : 2 Agustus 2024 pukul 11.00 – 13.15 WIB
Disusun : 3 Agustus 2024
Tempat Wawancara : Lingkungan Desa Umbu'asi Barat
Topik Wawancara : 1. Kesiapan Pemerintahan Desa Dalam Mengoperasikan Aplikasi Siskeudes.
2. Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat.

Materi Wawancara	
Kesiapan Pemerintahan Desa Dalam Menerapkan Aplikasi Siskeudes	
Peneliti	Bagaimana kesiapan pemerintahan desa Umbu;asi Barat dalam menerapkan aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Kesiapannya pemerintahan desa mengadakan training untuk operator Siskeudes, training diadakan lebih dua kali, agar mudah memahami dalam menjalannkan aplikasi tersebut.
Informan 2	Kesiapan pemerintahan desa dalam melaksanakan aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah dikatakan siap, karena dari segi SDM sudah terpenuhi.
Peneliti	Bagaimana cara Pemerintahan Desa dalam Megintergrasikan aplikasi Siskeudes kepada SDM nya?

Informan 1	Sebelumnya ada solusi dari Pemerintahan Desa kemudian ada training untuk operatornya tidak hanya sekali tapi berulang kali. Jadi operator dikumpulkan kemudian dibimtek bagaimana cara menggunakan aplikasi Siskeudes. Kebetulan saya dulu yang mengoperatori jadi saya dibimtek. Kemudian tahun 2023 kita mengangkat staf keuangannya itu Bapak Abdi Putra sebagai operator Siskeudes.
Informan 2	Karena aplikasi Siskeudes ini sangat ribet, banyak menu-menunya, tetapi cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia melalui pendampingan dan pelatihan. Selain itu kita harus mau belajar, kita harus mengikuti dan mencermati semua prosesnya. Karena ini juga sistem yang baru dan banyak prosesnya, jadi kita juga harus lebih aktif belajarnya. Kita harus lebih aktif bertanya apabila kita ada kendala, kalau tidak aktif kita tidak akan bisa.
Peneliti	Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes dan perbedaannya bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Yang mengoperasikan hanya satu yaitu operator Siskeudes Bapak Primer Abdi Putra, tapi masih berhubungan erat dengan saya sebagai bendahara desa, tapi disetujui oleh semua perangkat sebenarnya berkaitan dengan ini tapi hanya satu orang mengoperatori kalau lebih dari satu nanti malah rusak aplikasinya. Untuk perbedaannya tidak ada yang membedakan menggunakan excel dengan aplikasi siskeudes hanya kalau dulu anggaran desa kecil sekarang desa besar jadi pemerintahan mewajibkan menggunakan aplikasi siskeudes. Jadi dari segi penggunaannya tidak ada yang membedakan sama saja.

Informan 2	Yang mengoperasikan aplikasi siskeudes seorang operator atau saya sendiri, sebagai operator desa sejak tahun 2023 hingga saat ini, perbedaannya ya sangat berbeda sekali, sebelum ada aplikasi. Perbedaannya lebih mudah menggunakan aplikasi siskeudes karena pekerjaan lebih mudah dikerjakan, kita sebagai operatornya tinggal memasukan saja nominal uang yang ada di APBDes.
Peneliti	Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah menerapkan aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Laporan keuangan sangat aman dan terjaga sekali. Pemantauan dan pengawasannya sangat mudah sekali kalau memang ada kebocoran-kebocoran keuangan pasti diketahui jadi anggaran tidak bisa dimanipulasi.
Informan 2	Setelah menggunakan aplikasi siskeudes laporan keuangan semakin tertatarapi dan dapat dipahami oleh semua orang. Akuntabilitas dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan setiap kegiatan/program yang dijalankan.
Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat	
Peneliti	Sejak kapan desa Umbu'asi Barat mulai menerapkan aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Sejak tahun 2022, saya yang mengoperasikan sebelum dibantu operator siskeudes yang sekarang ini.
Informan 2	Sebenarnya siskeudes mulai diterapkan di Desa Umbu'asi Barat Oktober 2022 sudah dibimtek tapi belum valid penggunaan yang selanjutnya tahun 2023 aplikasi siskeudes baru benar-benar

	diterapkan disini.
Peneliti	Apakah didesa Umbu'asi Barat sudah menerapkan yang namanya PSAP 02 dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Masih belum, karna terbatasnya pengetahuan bagaimana menerapkan PSAP 02.
Informan 2	Iya masih belum, karena kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa.
Peneliti	Apakah implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat memengaruhi kinerja pemerintahan desa dalam menyusun laporan keuangan desa ?
Informan 1	Sebenarnya yang mempengaruhi kinerja itu jumlah anggarannya kalau anggarannya sedikit pengerjaannya juga sedikit tapi kalau dananya banyak/besar maka pengerjaannya juga banyak.
Informan 2	Sangat mempengaruhi karena semenjak menggunakan aplikasi siskeudes kinerja lebih teliti, tepat waktu, dan disiplin.
Peneliti	Apa dampak yang dirasakan dengan adanya aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Dampak yang dirasakan gak ada sama saja tapi memang lebih aman saja.
Informan 2	Penggunaan anggaran yang saat ini dikelola menggunakan aplikasi siskeudes itu benar nyata tidak akan bisa selisih ketemu real angkanya.

PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PSAP 02 (PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH) DI DESA UMBU'ASI BARAT

ORIGINALITY REPORT

57%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet	423 words — 8%
2	repository.stiedewantara.ac.id Internet	251 words — 5%
3	repository.unhas.ac.id Internet	226 words — 4%
4	massaile.desa.id Internet	155 words — 3%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet	98 words — 2%
6	repository.unja.ac.id Internet	92 words — 2%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	87 words — 2%
8	digilib.unila.ac.id Internet	72 words — 1%

9	www.scribd.com Internet	64 words — 1%
10	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	60 words — 1%
11	repository.unmuhjember.ac.id Internet	60 words — 1%
12	core.ac.uk Internet	56 words — 1%
13	pdfcoffee.com Internet	46 words — 1%
14	repository.itbwigalumajang.ac.id Internet	46 words — 1%
15	repository.usd.ac.id Internet	43 words — 1%
16	eprints.ums.ac.id Internet	42 words — 1%
17	docplayer.info Internet	38 words — 1%
18	theses.iainponorogo.ac.id Internet	36 words — 1%
19	ejournal.unsrat.ac.id Internet	35 words — 1%
20	repository.unmuha.ac.id Internet	35 words — 1%

21	repository.radenintan.ac.id Internet	33 words — 1%
22	repository.iainpare.ac.id Internet	30 words — 1%
23	repository.umsu.ac.id Internet	30 words — 1%
24	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	29 words — 1%
25	repository.ar-raniry.ac.id Internet	28 words — 1%
26	repository.stiegici.ac.id Internet	27 words — 1%
27	text-id.123dok.com Internet	27 words — 1%
28	poncowarno.kec-poncowarno.kebumenkab.go.id Internet	26 words — < 1%
29	repository.uir.ac.id Internet	26 words — < 1%
30	dspace.uii.ac.id Internet	25 words — < 1%
31	id.123dok.com Internet	24 words — < 1%
32	repository.ub.ac.id Internet	23 words — < 1%

dspace.umkt.ac.id

33	Internet	21 words — < 1%
34	repositori.stiamak.ac.id Internet	21 words — < 1%
35	Tika Ade Putri Pattikayhatu, Ramos P Pasaribu. "Evaluasi kios sederhana pada kawasan pesisir pantai pami dengan pendekatan arsitektur ekologis serta peran vegetasi pantai sebagai penyaring alami", International Journal of Engineering & Technology, 2024 Crossref	20 words — < 1%
36	library.binus.ac.id Internet	20 words — < 1%
37	porsepnifc.blogspot.com Internet	19 words — < 1%
38	Sri Yanti, Nedi Hendri, Jawoto Nusantoro. "ANALISIS AKUNTANSI LINGKUNGAN PADA PENGELOLAAN LIMBAH SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TANGGUNG JAWAB CSR SOSIAL PADA PERUSAHAAN PT SUGAR GROUP COMPANIES", Jurnal Akuntansi AKTIVA, 2021 Crossref	18 words — < 1%
39	blogsainulh.wordpress.com Internet	18 words — < 1%
40	eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id Internet	18 words — < 1%
41	eprints.umg.ac.id Internet	18 words — < 1%
42	etheses.uin-malang.ac.id Internet	18 words — < 1%

43	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	18 words — < 1%
44	repository.upi.edu Internet	18 words — < 1%
45	R Rukun, Muhammad Hanif. "Kesenian Gajah-gajahan di Kaponan Mlarak Ponorogo (Studi nilai budaya dan potensinya sebagai sumber pembelajaran IPS SD)", Gulawentah:Jurnal Studi Sosial, 2021 Crossref	17 words — < 1%
46	admin.ebimta.com Internet	17 words — < 1%
47	arl.ridwaninstitute.co.id Internet	17 words — < 1%
48	repository.ummat.ac.id Internet	17 words — < 1%
49	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	16 words — < 1%
50	repositori.uma.ac.id Internet	16 words — < 1%
51	repository.widyatama.ac.id Internet	16 words — < 1%
52	Suci Aprilia, Elisa Susanti. "Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Good Village Governance di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut", BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, 2024 Crossref	15 words — < 1%

53	informatika.stei.itb.ac.id Internet	15 words — < 1%
54	repository.fe.unj.ac.id Internet	14 words — < 1%
55	repository.polimdo.ac.id Internet	14 words — < 1%
56	repository.uhn.ac.id Internet	14 words — < 1%
57	skripsistie.files.wordpress.com Internet	14 words — < 1%
58	ejurnal.stie-trianandra.ac.id Internet	13 words — < 1%
59	id.scribd.com Internet	12 words — < 1%
60	ijiswiratama.org Internet	12 words — < 1%
61	www.keuangandes.com Internet	12 words — < 1%
62	eprints.pancabudi.ac.id Internet	11 words — < 1%
63	repository.mercubuana.ac.id Internet	11 words — < 1%
64	repository.uki.ac.id Internet	11 words — < 1%

p2k.stekom.ac.id

65	Internet	10 words — < 1%
66	Vivi Pancasari Kusumawardani. "Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan", Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2020 Crossref	9 words — < 1%
67	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet	9 words — < 1%
68	dwiharisaputro.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
69	eprints.uns.ac.id Internet	9 words — < 1%
70	jatimtimes.com Internet	9 words — < 1%
71	library.universitaspertamina.ac.id Internet	9 words — < 1%
72	repo.apmd.ac.id Internet	9 words — < 1%
73	repository.uiad.ac.id Internet	9 words — < 1%
74	zombiedoc.com Internet	9 words — < 1%
75	digilib.iain-jember.ac.id Internet	8 words — < 1%
76	digilib.uinkhas.ac.id Internet	

8 words — < 1%

77 ejournal.mandalanursa.org
Internet

8 words — < 1%

78 ejournal.upnvj.ac.id
Internet

8 words — < 1%

79 kodam14hasanuddin-tniad.mil.id
Internet

8 words — < 1%

80 pt.scribd.com
Internet

8 words — < 1%

81 repositori.usu.ac.id
Internet

8 words — < 1%

82 repository.wima.ac.id
Internet

8 words — < 1%

83 Muharsono, Linda Asfiah. "EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (STUDI TENTANG APLIKASI PELAPORAN KEUANGAN DESA DI DESA WAJAK LOR KECAMATAN BOYOLANGU KABUPATEN TULUNGAGUNG)", Jurnal PUBLICIANA, 2021

6 words — < 1%

Crossref

84 Patricia Watulingas, Lintje Kalangi, I Gede Suwetja. "Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa)", Indonesia Accounting Journal, 2019

6 words — < 1%

Crossref

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF